

# Artikel 11

*by Paper 11*

---

**Submission date:** 03-Dec-2022 03:35PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1970084586

**File name:** NEGERA\_DAN\_SYARI.pdf (301.22K)

**Word count:** 2534

**Character count:** 16180

## NEGERA DAN SYARI'AT ISLAM: ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN

Oleh: Abd. Jabar Abdul

### Abtrack

<sup>2</sup> Polemics around state agree with Islamic ideology and Islamic sharia being discoursed until now, pull and draws between ideas that good state must based on Islamic ideology and or nationalism ideology "secular" always takes place between conservatist and modernist, for Conservatist, Islam is religion and state ideology which must become basic of motion from all segment of human life including in having state. Meanwhile modernist argue that Islam is religion and do not arrange political problem, State for modernist is neutral which included in worldly scope and ijtihadiah (reasonable), In Indonesia, this discourse still become crucial Islam population here is very big, they don't agree with Islamic state, For them, what required is a political system which really democratic and fair that capable to guarantee all citizens prosperity and here actually the spirit of Islam lies on.

Kata Kunci: Syari'at Islamic, Ideology, Islam Kultural

### <sup>1</sup> Pendahuluan

Sejak pertengahan abad XIX dan memasuki abad ke XX, dunia Islam diperhadapkan dengan berbagai dinamika pemikiran pada atataran sosio politik. Pasa ini umumnya dikenal sebagai pasa kebangkitan (modern) setelah lebih dari enam abad dunia Islam mengalami stagnasi (kemunduran) dan kejumudan di dalam berbagai segmen kehidupan.<sup>1</sup>

Manifestasi terpenting dari makna kebangkitan abad XX tersebut ditandai dengan dua fenomena menarik yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan pemikiran dan dinamika politik dunia Islam; *Pertama*, adanya kesadaran identitas bahwa dunia Islam dalam masa yang begitu Panjang (6 abad) telah tertidur Panjang, dan dalam kondisi itu mereka telah dijajah hak-hak kemerdekaannya serta dieksploitir negerinya oleh bangsa-bangsa barat. Dengan demikian mereka harus bangkit bercermin dan melakukan berbagai pembenahan terhadap cara pandang mereka terhadap ajaran Islam baik secara doctrinal, maupun sosiopolitik dan kultural.

*Kedua*, dengan adanya kesadaran identitas tersebut, muncul keinginan dunia Islam (negeri-negeri Islam) untuk membebaskan diri dari hegemoni kolonialisme barat. Keinginan itu kemudian termanifestasikan dalam bentuk munculnya perjuangan kemerdekaan negeri-

<sup>1</sup> Lihat Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987).

<sup>1</sup> negeri Islam. Dan seperti diketahui, disekitar pertengahan abad XX, umumnya negeri-negeri Islam telah mentakan kemerdekaannya.<sup>2</sup>

Problema menarik yang umumnya dihadapi oleh negara-negara Islam yang baru menyatakan kemerdekaannya itu adalah kesulitan untuk melakukan artikulasi ajaran Islam pada tataran negara bangsa (*nation state*) seperti diketahui kolonialisme yang masuk ke dunia Islam pasca revolusi industri abad ke XVII dan XVIII membawa gagasan-gagasan baru seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, modernisasi dan yang lebih penting dikemukakan di sini adalah ideologi kebangsaan atau paham negara bangsa (*nasionalisme*).<sup>3</sup>

Ideologi nasionalisme yang diselundupkan dari barat tersebut tampaknya merupakan sesuatu yang baru di dunia Islam dan tentu antagonis dengan paham khilafah (kepemimpinan universal) yang telah melembaga di dunia Islam. Dalam perspektif tersebut dunia Islam sangat terpengaruh dengan paham kebangsaan ini. Buktinya, sistem kepemimpinan dunia Islam (*khilafah*) kemudian kehilangan elan vitalnya. Ke khalihan Turki Usmani yang merupakan pemegang supermasi kekuasaan dunia Islam waktu itu tidak efektif bertahan dengan derasnya paham kebangsaan ini.<sup>4</sup> Sistem khilafah selanjutnya runtuh melalui tangan dinginya Mustafa Kemal Attaturk melalui revolusi Turki tahun 1924.<sup>5</sup> Turki akhirnya menjadi negara bangsa dan lebih ironis lagi memproklamirkan dirinya menjadi negara sekuler. Dari sini pemikiran politik Islam mulai memasuki babak baru dan lebih kursial.

### **Dinamika Pemikiran Politik Islam Pasca Khilafah**

Pasca revolusi Turki, polemik-polemik di sekitar ideologi negara dari negara-negara yang baru dan sedang merintis kemerdekaannya terus mewacana. Tarik menarik antara pemikiran bahwa negara yang baik harus berdasarkan pada ideologi Islam (tegasnya melaksanakan syari'at Islam) ataukah pada ideologi nasionalisme yang cenderung "sekuler" terus berlangsung antara kelompok konservatif dan kelompok modernis. Bagi kalangan

---

<sup>2</sup> Lihat Edward Mortimer *Islam and Power*, terjemahan oleh, Ihsan Ali Fauzi, (Bandung: Mizan, 1985), h. 13-15.

<sup>3</sup> Harun Nasution, *Op. Cite.*, h. 4, Lihat juga John L. Esposito, *Islam and Development: Religion and Sociopolitical Change*, (New York: Syracuse University press, 1980), h. 3-18.

<sup>4</sup> Lebih lanjut mengenai perkembangan pembaruan Islam di Turki, baca harun Nasution, *IOP. Cite.*, h. 4.

<sup>5</sup> Lihat Nurchohis madjid, *Sekularisme; Belajar dari Turki dan Jepang*, dalam Donald Eugene smith, *Religion and Secularism*, terj. Oleh Adzumardi Azra dengan judul; *Agama Di tengah SEKularisme Politik*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), h. vi-xxi.

<sup>1</sup> konservatif Islam adalah agama sekaligus ideologi negara yang harus menjadi landasan gerak dari seluruh segmen hidup manusia termasuk di dalamnya urusan bernegara. Sementara itu kalangan modernis berpandangan bahwa Islam adalah agama dan bukan mengatur masalah kenegaraan. Negara, bagi kalangan modernis adalah sesuatu yang netral yang termasuk dalam wilayah duniawi dan ijthadiyah.<sup>6</sup>

Hasil dari diskursus tersebut, kini kita melihat setidaknya terdapat tiga protipe dari bentuk-bentuk negara Islam di dalam memaknai model negaranya. *Pertama*, negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam tapi Islam tidak dijadikan sebagai ideologi negara, bahkan Islam tidak dilibatkan dalam urusan negara. Lebih dari itu dalam konstitusinya disebut negara sekuler. Turki dalam hal ini merupakan contoh untuk tipe pertama ini.

*Kedua*, protipe dari negara Islam yang jelas dan secara tegas menyatakan di dalam konstitusinya sebagai negara Islam, atau Islam dan hukum Islam dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Pakistan, Arab Saudi, Iran adalah contoh untuk tipe ini. Kemudian yang *ketiga*, negara yang mayoritas penduduknya Islam namun Islam tidak dijadikan ideologi negara dan juga menolak sekularisme. Islam diposisikan sebagai suatu kekuatan riil yang mengkultur. Indonesia adalah contoh untuk tipe ini.<sup>7</sup>

Kita tentu memiliki keterbatasan ruang untuk mengulas lebih jauh mengenai perkembangan-perkembangan mutakhir di seputar ketiga model varian negara-negara Islam seperti dikemukakan di atas. Namun yang perlu dikatakan di sini bahwa wacana negara Islam dalam perspektif empiris masih sangat sulit mencapai titik idealnya. Di Pakistan yang memproklamkan negaranya sebagai negara Islam, ternyata di negara ini “Islam” masih sulit didefinisikan.<sup>8</sup> Kelompok konservatif yang dimotori oleh Abul A’la al-Maududi terus bersitegang dengan kelompok modernis dari kalangan pengikut Fazlur Rahman.

---

<sup>6</sup> Kajian menarik dalam hal ini dapat dilihat dalam, Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam, Op.Cit.* Lihat juga, Ali Abd Al-Raziq, *Al-Islam wa Ushulil Hukmi*, (Kairo: Dar al-Kutb, 1966). Bandingkan juga dengan Abul A’la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, Terj. (Bandung: Mizan, 1984). Lihat juga buku Maududi yang lain, *Khilafah dan Kerajaan*, Terj. (Bandung: Mizan, 1986). Baca juga Nazeah Ayubi, *Political Islam: Religion and Politics in The Arab World*, (New York: Routledge, 1991).

<sup>7</sup> Lihat, Munawir Sjadzali, *Islam dan Tatanegara*, (Jakarta: UI Press, 1992), h. 3. Bandingkan juga dengan Nazeah Ayubi, *Ibid*, h. 1-34.

<sup>8</sup> Lihat John L. Esposito, ed. *Islam end Politics*, (New York, Syracuse University Press, 1984), h. 142 dst. Baca juga H. A. Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern: India dan Pakistan*, (Bandung: Mizan, 1988).

1

Dari perspektif historis, negara Islam (kalau bisa dikatakan demikian) yang paling ideal hanya ada pada pemerintahan nabi di Madinah dan sedikit pada masa pemerintahan *al-khulafa' al-rasyidun*, khususnya masa Abu-Bakar al-Shiddiq. Pasca fase ini, sistem kekuasaan negara dari masa yang paling dini dari sejarah Islam telah diwarnai oleh intrik dan berbagai pergolakan politik. Kita mencatat dari ke-empat al-khulafa' al-rasyidun, hanya Abu Bakar yang wafat secara wajar. Ketiga khalifah yang lain (Umar, Utsman dan Ali) meninggal dengan cara mengenaskan, yaitu dibunuh oleh para pemberontak yang berdarah dingin. Inilah awal skisme (*al fitnah al-kubra* – ujian besar) yang melanda umat Islam.<sup>9</sup>

Dari konstalasi politik Islam awal ini terbaca bahwa Islam tidak memiliki sebuah konsep final mengenai negara dan sistem ketatanegaraan. Kendatipun demikian, Islam menurut seperangkat prinsip dasar mengenai bagaimana kekuasaan negara itu harus bekerja. Prinsip-prinsip itu antara lain; Prinsip tauhid, prinsip keadilan, egalitarianisme, demokrasi, dan pluralitas.<sup>10</sup> Prinsip-prinsip ini sangat ditekankan Islam terhadap kekuasaan, namun masih terus mengundang perdebatan. Di satu pihak bagi kelompok ideologis berpandangan bahwa hanya dengan negara Islamlah prinsip-prinsip tersebut bisa ditegakkan. Sedangkan kelompok modernis berpandangan prinsip-prinsip tersebut dapat saja ditegakkan tanpa harus sebuah negara berdasarkan Islam (hukum Islam).

### **Syari'at Islam: Sebuah Perdebatan yang Melelahkan**

Dalam konteks ke-Indonesia-an, tarik-menarik antara pandangan mengenai negara Islam dan negara nasional tampaknya mewacana sejak awal munculnya nasionalisme Indonesia. Yakni sejak munculnya Sarekat Dagang Islam (SDI) tahun 1911 yang kemudian terdapat antitesa dari kelompok nasionalis muda yang tergabung dalam Perhimpunan Indonesia.<sup>11</sup>

1

---

<sup>9</sup> Lebih lanjut mengenai masalah skisma, lihat, Nurcholish Madjid, "*Skisme dalam Islam: Tinjauan Singkat Secara Kritis-Historis Terhadap Proses Dini Perpecahan Sosial Keagamaan Islam*" dalam, Budi Munawar Rahman, ed. *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1994), h. 668-690. Lihat juga tulisan Jalaludin Rahmat dalam buku yang sama, "*Skisme dalam Islam: Sebuah Telaah Ulang*", halaman, 692 dst.

<sup>10</sup> Lihat Munawir Sjadzali, *Op. Cit.*, h. 4.

<sup>11</sup> Mengenai hal tersebut di atas, lihat misalnya, Deliar Nor, *Gerakan Modern Islam di Indonesia: 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1996).

1

Kristalisasi dari polemik-polemik mengenai dasar negara (antara Islam dan nasional) semakin mengerucut pada paruh pertama tahun 1945. Yaitu sekitar bulan Mei sampai dengan awal Agustus 1945. Akhirnya panitia Persiapan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang ditunjuk untuk merumuskan Dasar Negara dan Menyusun Undang-Undang Dasar berhasil mencapai kompromi untuk mengakomodir syari'at Islam ke dalam konteks kenegaraan Indonesia. Kompromi politik ini kemudian dikenal dengan prinsip "Piagam Jakarta" atau Jakarta Carter.<sup>12</sup>

Sebuah gambaran kemenangan kelompok Islam terlihat dengan adanya "tujuh kata sakral" pada sila pertama Pancasila versi Piagam Jakarta tersebut, namun disaat-saat menjelang lahirnya "bayi mungil" Indonesia, ketujuh kata itu akhirnya dicoret dari Piagam Jakarta. Ketujuh kata itu adalah : "Dengan Kewajiban Menjalankan Syari'at Islam Bagi Pemeluknya", dan diganti dengan "Yang Maha Esa" (lengkapnya Ketuhanan Yang Maha Esa). Inilah kompromi politik antara kelompok Islam dan nasionalis untuk menghindari perpecahan.<sup>13</sup>

Kompromi politik ini pada akhirnya kembali lagi dimentahkan tatkala pada dekade akhir tahun limapuluhan, presiden Soekarno membentuk badan Konstituante yang ditugaskan untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru menggantikan UUD-1945. Saat-saat ini, wacana mengenai negara Islam atau syari'at Islam sebagai dasar negara menjadi polemik dan perdebatan yang sangat menguras energi dan melelahkan.<sup>14</sup>

Perdebatan kelompok Islam dengan kelompok nasionalis tidak dapat mencapai kata sepakat yang akhirnya berbuntut dengan Dekrit Presiden, 5 Juli 1959, yang intinya adalah kembali ke UUD-1945. Sejalan dengan itu kekuatan-kekuatan politik Islam mulai mendapat marginalisasi dari kekuasaan. Partai Masyumi dibubarkan oleh Soekarno, di samping itu konflik internal kekuatan-kekuatan politik Islam juga semakin meruncing.<sup>15</sup>

1

---

<sup>12</sup> Tentang piagam Jakarta, Lihat Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998).

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 45-60.

<sup>14</sup> Untuk informasi selengkapnya mengenai perdebatan dalam Konsituante, lihat Ahmad Syafi'Iy Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Sudi Mengenai Perdebatan dalam Konsituante*. (Jakarta: LP3ES, 1989).

<sup>15</sup> Tentang hal ini lihat Deliar Nor, *Partai-Partai Islam di Pentas nasional*, (Jakarta: Grafitti Press, 1991). Bandingkan juga dengan B.J. Boland, *Perjuangan Islam dalam Indonesia Modern*" dalam Ahmad Ibrahim et.al.

<sup>1</sup> Pada masa awal Orde Baru, harapan untuk kembalinya kekuatan politik Islam semakin hadir pada kalangan elit politik Islam. Hal ini dikarenakan kekuatan-kekuatan Islam lebih banyak berperan di dalam tumbangannya rezim Orde Lama. Namun demikian, tampaknya Orde Baru juga memiliki pandangan yang berbeda terhadap Islam ideologi. Kekuatan-kekuatan politik Islam kemudian secara pelan dan pasti dibabat habis dalam perpolitikan Orde baru.<sup>16</sup> Di bawah Orde Baru, seluruh kekuatan politik kemasyarakatan yang dianggap progresif dan berpotensi kepada perpecahan ideologis, dipaksakan untuk menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas di dalam berpolitik maupun bermasyarakat.<sup>17</sup> Dengan demikian dapat dikatakan semasa Orde Baru peran Islam politik yang ingin mengusung negara Islam mengalami kegagalan total, karena Orde Baru memiliki kekuatan represif untuk menindak setiap kekuatan oposisi.

### **Tranformasi dari Islam Ideologi ke Islam Kultural**

Gerakan Islam politik dengan format ideologis seperti tersebut di atas, dalam konteks tertentu ternyata tidak mudah mendapat apresiasi masyarakat, baik oleh kalangan umat Islam sendiri yang berpaham nasionalis maupun kalangan lain di luar Islam. Kegagalan demi kegagalan dari gerakan Islam politik telah memunculkan kesadaran baru di antara sebagian aktifis Islam yang ingin keluar dari wilayah politik dan memilih perspektif kultural sebagai arena perjuangan mereka.<sup>18</sup>

Sekitar tahun tujuh puluhan format gerakan Islam di Indonesia setidaknya mengalami beberapa pergeseran yang signifikan, dari gerakan tersebut tampaknya tetap berpijak pada realitas objektif akan kegagalan-kegagalan Islam politik dan perjuangannya selama ini.

---

<sup>1</sup> (ed). Islam di Asia Tenggara: Perkembangan Kontemporer, (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 9-21, dan juga tulisan Howard M Fedespiel, "Militer dan Islam pada masa pemerintahan Soekarno di Indonesia" dalam buku yang sama, h. 39-56.

<sup>16</sup> Untuk Informasi tentang Islam Indonesia pada masa Orde Baru, lihat misalnya, Allan A. samsod Islam Indonesia Sejak Orde baru dalam Ahmad Ibrahim at. Al., (ed) Islam di Asia Tenggara..., Op. Cit. 71-82, Lihat juga M. Rusli Karim, Negara dan peminggiran Islam Politik, (Yogyakarta: Tiara wacana, 1999).

<sup>17</sup> Bandingkan juga dengan Fakhri Aly dan Iqbal Abdurrauf Saimima, Merosotnya Aliran dalam Partai Persatuan pembangunan" dalam Prisma, No. 12, Desember 1981, h. 24-43.

<sup>18</sup> Lihat Bachtiar Effendi, Islam dan negara: transformasi pemikiran dan Praktik Politik islam di Indonesia, (Jakarta: paramadina, 1998), h. 125-164.

<sup>1</sup> Muncul beserta gerakan baru itu tokoh-tokoh Intelektual muda seperti Nurcholish Madjid, Ahmad Wahid, Dawam Rahardjo, Djohan Effendy dan lainnya, yang kemudian menawarkan gagasan tentang pentingnya pembaharuan Islam.<sup>19</sup> Dalam pandangan cendekiawan-cendekiawan mud aini, bahwa format gerakan Islam harus ditinjau kembali sehingga mampu memberi perspektif baru yang lebih kultural, tidak harus dalam perspektif politik semata.

Dalam perkembangan selanjutnya, tawaran pembaruan pemikiran Islam yang dilontarkan Nurcholish Madjid dan teman-temannya tersebut mendapat sambutan yang luar biasa, khususnya pada aktifis muda yang tercerahkan, walaupun pada tataran tertentu mereka masih juga sering mendapat kritikan dari kalangan aktifis Islam politik dan dalam konteks tertentu oleh kaum skriptualis Islam. Karena pandangan-pandangan kalangan pembaru ini sedikit banyaknya menguntungkan rezim Orde Baru ketika itu. Namun demikian kekuatan Islam kultural ini kemudian sangat mempengaruhi perubahan-perubahan signifikan di dalam format politik nasional menjelang berakhirnya rezim Orde baru.

Tumbangnyarezim Orde Baru dari kekuatan-kekuatan reformis seperti dunia kampus, tampaknya memberi perspektif baru bagi munculnya kekuatan Islam ideologis yang hendak memperjuangkan negara Islam. Hal ini terlihat begitu menjamurnya partai Islam di awal reformasi ini. Wacana syari'at Islam masih kultural sudah dapat dikatakan merata. Mereka ini tidak menghendaki negara Islam. Kecuali itu yang dibutuhkan adalah sebuah sistem kenegaraan yang benar-benar adil demokratis yang mampu menjamin semua warga negara. Dan disinilah sebenarnya spirit Islam.<sup>20</sup>

### **Kesimpulan**

Dalam konteks kekinian, debat mengenai negara Islam (syari'at Islam) hanyalah merupakan debat yang menguras habis energi dan tidak menghasilkan sesuatu. Bahkan kebanyakan politisi Islam menggunakan wacana ini hanya sekedar sebagai cara untuk menarik simpati umat. Para pembawa bendera-bendera politik Islam harus lebih banyak bercermin dari perjalanan sejarah perpolitikan Indonesia. Dengan begitu isu-isu lama yang sudah memfossil

<sup>19</sup> Tentang *Pembaharuan Islam Indonesia*, Lihat Nurcholish madjid, *Islam kemoderenan dan keindonesiaan*, (bandung: Mizan, 1993), h. 125. Baca juga Muhammad kamal hasan, *Modernisasi di Indonesia: Respon cendekiawan Muslim*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1987).

<sup>20</sup> Bandingkan dengan Nurcholish Madjid et.al, *Islam Yes, Syari'at islam* No, (Jakarta: Paramadina, 2000).



1  
sudah harus ditinggalkan. Tanpa menyebut negara Islam, agenda-agenda bangsa yang cukup menghadang dan tidak kurang muatan religiusitas keislamannya adalah keadilan, pemberantasan KKN, hak asasi manusia (HAM), demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Bila agenda ini berhasil diperjuangkan maka negara Indonesia yang ber-Pancasila ini tidak kurang keislamannya dari negara-negara yang secara formal menjadikan Islam sebagai ideologi negara. Dengan demikian yang diharapkan adalah Islam harus menjadi sebuah “kekuatan etik” dan moral dalam menyelesaikan berbagai agenda besar bangsa.

#### DAFTAR PUSTAKA

Ali, H.A., Mukti, *Islam dan Sekularisme di Turki Modern*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.

....., *Alam Pikiran Islam Modern: India dan Pakistan*, Bandung: Mizan, 1988.

Ali, Fachri dan Iqbal Abdurrauf Saimima, “*Merosotnya Aliran dalam Partai Persatuan pembangunan*” dalam *Prisma*, No. 12, Desember 1981.

Ali-Maududi, Abul A’ala’, *Sistim Politik Islam*, Terj. Bandung: Mizan, 1984.

....., *Khilafah dan Kerajaan* Terj. Bandung: Mizan, 1986.

Anwar, Dewi Fortuna, *Ka’abah dan Garuda: Dilema Bagi islam Indonesia*”, dalam *Prisma*, No. 4. April 1984.

Anshari, Endang Saifuddin, *Piagam Jakarta*: gema Insani Press, 1998.

Ayubi, Nazch, *Political Islam: Religion and Polics in the Arab World*, New York: Routledge



# Artikel 11

---

## ORIGINALITY REPORT

---

94%

SIMILARITY INDEX

94%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

1

[tahkimjurnalsyariah.wordpress.com](http://tahkimjurnalsyariah.wordpress.com)

Internet Source

89%

---

2

[repository.iainambon.ac.id](http://repository.iainambon.ac.id)

Internet Source

5%

---

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On